

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA RINGINREJO KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

Siska Wulan Yuni

12040674024 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: bp522012@gmail.com

Tauran, S.Sos., M.Soc., Sc

0013047602 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: tauran@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu upaya bagi pemerintah saat ini untuk menangani berbagai masalah publik salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Dalam hal menyetarakan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia, pemerintah pusat membuat kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian yaitu Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA). Melalui PKA pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat perdesaan. Implementasi PKA di Desa Ringinrejo adalah salah satu gambaran yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan PKA. Desa Ringinrejo dipilih menjadi salah satu kawasan PKA karena kondisi perekonomian masyarakatnya yang masih jauh dari kesejahteraan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Kemudian teknis pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan yang meliputi pelaksana maupun kelompok sasaran PKA Desa Ringinrejo.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi implementasi PKA di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro masih kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar seperti komunikasi, sumber daya anggaran, pengangkatan birokrat (struktur birokrasi), dan informasi pada pelaksanaan PKA di Desa Ringinrejo, pelaksana PKA Desa Ringinrejo juga telah berkontribusi dan menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOPs), namun demikian masih terdapat kendala yang ditemui antara lain tidak adanya diversifikasi rasa buah belimbing dari masam menjadi manis, lambatnya pemasaran produk olahan belimbing, persediaan buah belimbing yang terbatas, dan kelembagaan yang kurang berjalan. Dengan demikian, sebaiknya ada pelatihan rutin dari pemerintah mengenai bagaimana membuat produk olahan yang memiliki kualitas tinggi, pelatihan untuk pemanfaatan teknologi, memberikan bantuan melalui subsidi pupuk agar petani juga tidak terlalu berat di pembiayaan, pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana, kemudian pemerintah harus memperhatikan insentif sebagai wujud dari penghargaan agar pelaksana bersemangat untuk menjalankan kelembagaan demi tercapainya tujuan dari PKA di Ringinrejo.

Kata Kunci : *Implementasi, Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)*

Abstract

Sustainable development be an attempt for the government at this time to handle a range one of public issues is economic gap. In terms of equalizes economic community in Indonesia, the central government make sustainable development policy in agriculture that is in Agropolitan Development Area. Through in Agropolitan Development Area the government to do their best to promote a balanced welfare rural communities. The implementation of the Agropolitan Development Area in the village of Ringinrejo is one image that shows implementation activities Agropolitan Development Area. Ringinrejo village were chosen to be one of the Agropolitan Development Area because economic conditions people are still far from welfare.

A method of this research is descriptive qualitative. Data collected by used technique interview, observation and documentation. Then technical data collection used to obtain deep data from informants which includes implementors and the target group in Agropolitan Development Area in Ringinrejo village.

Based on the research done through the interviews, observation and documentation the implementation of Agropolitan Development Area in Ringinrejo village still not been successful. It was because although a series of the phase that goes well as communication, budget resources, removal of bureaucrats (bureaucratic structure), and information on the implementation of Agropolitan Development

Area in the Ringinrejo village, the implementors Agropolitan Development Area also has contributed and do their duty in accordance with standard operational procedures (SOPs). However there are still obstacles has been found nothing the diversification of fruit flavored star fruit sour become sweet, the slow processed its marketing star fruit, supplies star fruit limited, and institutional not running. there should be training held every the government about how to make the processed products that has high quality, training for the utilization of technology, providing assistance through fertilizer subsidy so that farmers are also not very heavily on financing, the government must complete facilities and infrastructure. Then the government should see incentives as a form of appreciation so that implementor passionately to run institutional to achieve the purpose of Agropolitan Development Area in the Ringinrejo village.

Key Word: *Implementation, Agropolitan Development Area*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan terarah yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan akan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan secara komprehensif sangat dibutuhkan saat ini karena selain untuk pengembangan sektor-sektor strategis dalam rangka pencapaian hasil pembangunan yang optimal juga agar keseimbangan lingkungan suatu wilayah tetap terjaga. Salah satu sektor pembangunan berkelanjutan yang sangat berpotensi adalah di sektor pertanian karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Pertanian di Indonesia memiliki peran yang cukup penting dari masa ke masa.

Kenyataan bahwa pertanian memang berperan dalam pembangunan terutama pada pembangunan ekonomi diungkapkan Badan Pusat Statistik. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan bahwa sektor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pertama adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 14,63% (<http://ekbis.sindonews.com/read/997551/33/5-sektor-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri-1430809457>).

Pertanian memang berperan sebagai penyumbang ekonomi secara besar namun hal tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan pembangunan pertanian diantaranya adalah masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif semakin menyempit, minimnya infrastruktur

perdesaan, rendahnya daya saing produk dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan. Untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah pusat membuat kebijakan yaitu kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA).

Menurut Kurniawati (dalam Herawan, 2013:5) pengembangan kawasan agropolitan merupakan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan menyinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) kemudian menjadi suatu kebijakan yang di terapkan dilingkup nasional dan daerah-daerah pada tahun 2002. Tujuan dan sasaran dari Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan.

Setelah memberikan dampak yang positif pada daerah-daerah percontohan, PKA kemudian dikembangkan di kawasan lain salah satunya Jawa Timur. Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang dijadikan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA), sesuai dengan surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:

188/183A/KEP/412.12/2008 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dijadikan sebagai kawasan PKA karena mempunyai potensi di bidang pertanian.

Agropolitan yang diterapkan di Bojonegoro terdiri dari berbagai bidang unggulan salah satunya yaitu komoditas hortikultura belimbing yang dibentuk menjadi kawasan agrowisata yang ada di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu. Pelaksana dari PKA di Desa Ringinrejo meliputi Tim POKJA dari Bappeda dan SKPD terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dinas pendukung seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan serta petani Desa Ringinrejo sebagai kelompok sasaran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di pengembangan kawasan agropolitan yang ada di Desa Ringinrejo adalah penataan lokasi, membentuk kelompok tani, menyemprot, dangir, pengeboran tanah, pengairan, dan penjualan buah belimbing. Selain kegiatan budidaya, juga terdapat kegiatan pelatihan dalam bentuk sekolah lapangan, sekolah lapang ini ditujukan selain menekankan pada peningkatan sumber daya kelompok sasarannya juga pada para pelaksana teknis.

PKA yang ada di Desa Ringinrejo memiliki inovasi yaitu Agrowisata berbasis IT dan *biopore*. Agropolitan Belimbing di Desa Ringinrejo satu-satunya kawasan di Kecamatan Kalitidu yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sehingga pelaksanaan Pengembangan Kawasan di Ringinrejo tidak terlepas dari permasalahan yang menyebabkan perkembangannya tidak cepat yaitu tidak adanya diversifikasi rasa buah belimbing dari masam menjadi manis, lambatnya pemasaran produk olahan belimbing, persediaan buah belimbing yang terbatas, dan kelembagaan yang kurang berjalan

Berdasarkan pada hal tersebut peneliti fokus mengambil implementasi kebijakan dengan judul “Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

Agropolitan di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : Bagaimana Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Agropolitan (PKA) di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan ilmu administrasi negara khususnya penelitian terkait implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu dapat digunakan mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang implementasi kebijakan.

b. Bagi Petugas Pelaksana Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa poin-poin implementasi yang mungkin perlu adanya langkah perbaikan untuk kebaikan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA).

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (Agustino 2012:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh James Arderson (Agustino, 2012:7) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dipilih oleh sekelompok aktor dan pemerintah dimana tindakan tersebut untuk mengatasi permasalahan publik di suatu lingkungan dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Van Metter dan Van Horn (Muchlis, 2014:99) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Merilee S. Grindle (Agustino, 2012:139) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan proses sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan dimana kebijakan tersebut sudah direncanakan untuk kemudian diarahkan pada perwujudan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang sebelumnya telah direncanakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen model sistem implementasi

kebijakan publik, terdiri atas : 1) program (kebijakan) yang dilaksanakan, 2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan: 3) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut, dan 4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) (Tachjan, 2006:36-37).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dalam model tersebut terdapat empat variabel yang mempengaruhi empat faktor atau variabel tersebut meliputi variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus (Winarno, 2005:174-175).

Model implemetasi yang dikemukakan oleh George Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan empat faktor atau variabel tersebut meliputi variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu dengan fokus komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subyek yang dipilih merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu:

Dinas Pertanian selaku anggota Tim POKJA Kabupaten, Dinas Pariwisata selaku Kepala UPT Agropolitan, BPP Kecamatan Kalitidu, Kepala Desa Ringinrejo selaku penasehat PKA, pendamping PKA, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Ketua Kelompok Tani selaku pelaksana teknis sekaligus pengawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Ringinrejo

Desa Ringinrejo merupakan wilayah dengan luas 166.065 ha yang mana sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan pertanian yaitu sekitar 84,050 Ha, sedangkan total luas lahan perkebunan mencapai 22,800 Ha yang terdiri dari 20,400 Ha untuk tanaman belimbing, dan 2,400 Ha untuk tanaman pisang. Desa Ringinrejo memiliki 3 (tiga) dusun yaitu terdiri dari Dusun Mejayan, Dusun Ngringin, Dusun Margorejo yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun). Desa Ringinrejo merupakan desa dengan jumlah penduduk mencapai 1939 jiwa yang terbagi kedalam 558 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Ringinrejo adalah petani mengingat sebagian besar wilayah adalah lahan pertanian dan juga latar belakang pendidikan yang masih rendah. Selain bertani keseharian penduduk Desa Ringinrejo adalah pengrajin, PNS, penjahit, tukang batu, pedagang, peternak, dan tukang kayu.

2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah.

Secara umum tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota

dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan.

Dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) yang menjadi *target group* atau kelompok sasaran adalah para masyarakat pelaku agribisnis dan petani yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA).

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Ringinrejo dilakukan oleh masyarakat petani, pelaku pemasaran, pelaku penyedia agroinput, pelaku pengolah hasil dan lain-lain yang didukung oleh fasilitas dari pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah lebih pada pemberian fasilitas bukn dana berupa uang.

3. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan agropolitan di Desa Ringinrejo

Berdasarkan surat keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/183A/KEP/412.12 /2008 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bojonegoro, akhirnya Bojonegoro mulai menerapkan PKA di empat Kecamatan salah satunya adalah di Kecamatan Kalitidu yang bertempat di Desa Ringinrejo. Kebijakan Pengembangan Kawasan di Desa Riginrejo mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan mengembangkan kawasan hortikultura buah belimbing yang dijadikan sebagai agrowisata berbasis IT dan *Biopore*.

Luas wilayah kebun belimbing mencapai 20,2 Ha dengan jumlah petani mencapai 106 orang. Kegiatan yang ada di agrowisata belimbing Ringinrejo adalah selain budidaya yaitu pendangiran, penyemprotan, pengeboran dan pengairan, juga terdapat kegiatan sekolah lapangan yaitu SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) dan SLGAP (Sekolah Lapang *Good Agriculture Practices*) sekolah lapang ini ditujukan selain menekankan pada peningkatan

sumber daya kelompok sasarannya juga pada para pelaksana teknis.

Pembahasan

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Ringinrejo yang berjalan hingga saat ini tidak terlepas dari keinginan untuk mewujudkan tujuan dari PKA di Desa Ringinrejo yaitu mensejahterakan masyarakat dan kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat Ringinrejo serta meningkatkan daya saing para petani di Desa Ringinrejo. Untuk mengetahui mengenai keberhasilan implementasi PKA di Desa Ringinrejo maka peneliti memilih menggunakan model implementasi milik George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Pada variabel komunikasi terdapat tiga sub variabel yaitu :

a. Transmisi

Transmisi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Penyampaian informasi ini tidak hanya antar pelaksana melainkan kepada kelompok sasaran. Proses transmisi pertama kali dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai PKA kepada para tokoh desa dan masyarakat Desa Ringinrejo, sosialisasi dilakukan sebulan sekali namun seiring berjalannya waktu sosialisasi yang dilakukan oleh Tim POKJA dan SKPD terkait jarang dilakukan akibat kesibukan lain. Meskipun sosialisasi jarang dilakukan namun pelaksana teknis menggantinya dengan diskusi rutin sebulan sekali agar transmisi tidak berhenti dan memberikan pemahaman yang setengah-setengah bagi para petani.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan sub indikator yang lebih mengarah pada sejauh mana informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada pihak lain secara jelas sehingga memberikan pemahaman kepada penerima informasi. Kejelasan dari pelaksanaan PKA ini dibuktikan dengan adanya pelatihan untuk para pelaksana teknis yaitu sekolah

lapang dan bimbingan teknis agar mereka memiliki wawasan lebih, karena pendamping maupun pelaksana teknis lainnya adalah aktor yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran.

Dalam pelatihan maupun sosialisasi petani yang datang tidak jarang adalah petani dengan usia lanjut, walaupun begitu tidak membuat mereka kesulitan dalam memahami terkait informasi yang disampaikan oleh pelaksana. Hal tersebut tidak terlepas dari penyampaian informasi yang menggunakan bahasa yang mudah diterima sehingga petani lebih cepat menangkap maksud dari informasi yang disampaikan oleh pelaksana teknis PKA di Desa Ringinrejo

c. Konsistensi

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan ialah dimensi konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah implementasi kebijakan pelaksana harus konsisten dan jelas.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan cukup memiliki kekonsistenan dalam pelaksanaannya. Baik dari konten kebijakan hingga prosedur yang dijalankan dan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Hal lain juga dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan materi yang konsisten mengenai kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Desa Ringinrejo.

2. Sumber Daya

Pada variabel sumber daya terdapat empat sub variabel yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PKA di Ringinrejo meliputi Tim POKJA dari beberapa SKPD terkait seperti dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian UPT Agropolitan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggungjawab dari berjalannya PKA di tingkat Kabupaten selanjutnya di tingkat Kecamatan ada BPP Pertanian Kalitidu, dibantu oleh Kepala Desa sebagai penasehat, dan pendamping

serta kelompok tani dan kelompok pokdarwis yang mengatur jalannya PKA di Desa Ringinrejo, di pihak swasta ada LSM yang terlibat dalam pelaksanaan PKA, sedangkan dari masyarakatnya sendiri adalah sebagai kelompok sasaran yaitu para petani belimbing di Desa Ringinrejo yang berjumlah 106 orang.

Dalam pengimplementasian PKA sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, namun dalam kenyataannya sumber daya manusia di Desa Ringinrejo masih perlu mendapatkan banyak pelatihan baik pelaksanaan teknis maupun kelompok sasaran. Permasalahan yang dialami disini adalah tidak adanya diversifikasi rasa yaitu mengubah rasa buah dari masam menjadi manis, kemudian petani masih belum bisa menyediakan buah belimbing secara kontinyu, pelaksana teknis dan petani masih belum bisa memasarkan produksi olahan belimbing sehingga produksi olahan berhenti. Sedangkan untuk saat ini pelaksana PKA dari kabupaten hingga tingkat bawah tidak rutin dalam mengadakan pelatihan agar sumber daya yang ada kompatibel dalam menjalankan PKA di Desa Ringinrejo.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan PKA di Desa Ringinrejo, dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan PKA. Pada awal terbentuknya PKA di Ringinrejo pemerintah sempat memberikan dana sebesar 200 juta pertahun dari tahun 2010 hingga 2012, namun saat ini petani belimbing di Desa Ringinrejo memang dilepas oleh pemerintah karena untuk pembiayaan petani sudah bisa mandiri sehingga tidak ada kendala yang berarti terhadap sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan PKA di Desa Ringinrejo

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam PKA di Desa Ringinrejo sebenarnya tidak banyak, namun tanpa adanya peralatan tersebut PKA tidak akan berjalan dengan baik. Peralatan tersebut meliputi

cultifator, *diesel*, alat pengebor yaitu *biopore*, dan pompa air. Sedangkan untuk pengolahan produk alat yang digunakan berupa juser, pengering keripik, wajan besar dan lain-lain.

Peralatan yang ada saat ini masih belum cukup sehingga berdampak pada kegiatan budidaya yaitu terbatasnya buah belimbing, disini lain justru peralatan untuk pengolahan produk belimbing justru tidak terpakai dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana lain masih jauh dari apa yang diinginkan, mengingat daerah agrowisata harus memiliki kondisi fisik yang bagus sehingga dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung.

d. Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini proses pelaksanaan penyampaian informasi berjalan dengan baik informasi yang didapat oleh petani melalui rapat maupun diskusi dianggap cukup banyak dan beberapa kali disampaikan sehingga mereka cukup mengerti mengenai PKA namun hal tersebut tidak terjadi pada seluruh petani hanya sebagian petani saja yang mengerti mengenai PKA.

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah Kabupaten sangat menggunakannya dengan baik namun hak tersebut berbeda dengan pelaksana teknis, mereka jarang menggunakan sumber daya kewenangan untuk mengatur jalannya PKA di Desa Ringinrejo.

3. Disposisi

Salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Adapun sub variabel disposisi antara lain :

a. Pengangkatan Birokrasi

Dalam pengangkatan birokrat untuk level Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan PKA dipilih langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah kecamatan sendiri Tim POKJA dan SKPD terkait membuat kesepakatan terkait siapa saja yang akan dijadikan pendamping untuk tiap-tiap kawasan agropolitan

termasuk PKA di Desa Ringinrejo. Pemilihan dari tim kerja maupun lainnya tidak didasarkan pada persyaratan khusus berbeda dengan pedoman umum mengenai PKA yang memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin merekrut pelaksana, pemilihan lebih didasarkan pada kemauan secara pribadi untuk memajukan PKA.

Meskipun tidak tepatu pada pedoman yang telah ditentukan pelaksana tingkat kabupaten dan pelaksana yang ada dibawahnya mampu menunjukkan kinerjanya yang baik untuk memajukan PKA hal tersebut diakui oleh para petani. Terlepas dari hal tersebut masih terdapat permasalahan yang cukup menghambat jalannya PKA, yaitu kurang adanya komitmen antara petani dan pelaksana teknis untuk menjalankan kelembagaan di PKA sehingga mangkrak dan tidak berjalan.

b. Insentif

Insentif adalah uang yang diterima pelaksana sebagai ganti dari tanggungjawab yang sudah dilaksanakan dalam menjalankan PKA. Untuk Tim POKJA maupun SKPD terkait sudah terdapat anggaran terkait insentif dari Bappeda, sedangkan untuk pelaksana teknis seperti pendamping, Ketua Pokdarwis, maupun ketua dari Kelompok Tani mendapatkan justru jarang mendapatkan insentif.

Pelaksana teknis hanya menerima sesekali sebagai umpan balik terhadap beratnya tanggungjawab yang mereka embn, insentif yang mereka dapatkan sangat jauh dari tanggungjawab yang mereka laksanakan. Namun pemerintah menekankan bahwa sekalipun pelaksana teknis atau tingkat desa jarang mendapat insentif, tetapi banyak manfaat yang bisa mereka peroleh dari apa yang mereka kerjakan, bagaimanapun ketika PKA ini berkembang dengan baik akan menguntungkan mereka karena selain sebagai pelaksana teknis mereka juga sebagai pelaku yaitu petani belimbing di Desa Ringinrejo.

4. Struktur Birokrasi

Di dalam struktur birokrasi terdapat dua sub variabel, dua sub variabel tersebut meliputi :

a. *Standard Operational Procedures (SOPs)*

Mekanisme atau SOP PKA yang di terapkan di Desa Ringinrejo sebenarnya tidak berbelit. Pada tahap awal pemberian data dari pusat kemudian pemerintah seperti Kementerian Pertanian dan BUMN, Tim POKJA Kabupaten, SKPD terkait, BPP Pertanian Kecamatan Kalitidu dan pengurus desa melakukan pertemuan awal. Dalam pertemuan awal bukan hanya mengundang pengurus desa dan tokoh-tokoh desa saja tetapi juga pihak swasta seperti LSM dan tentunya aparat petani. Dalam pertemuan tersebut para petani diberikan sosialisasi mengenai pengertian PKA, tujuan PKA, dan arah dari PKA sosialisasi PKA dimaksudkan untuk menyamakan dan menyatukan persepsi, penilaian, pemahaman dan gerak langkah dalam pelaksanaan PKA.

Kemudian setelah sosialisasi awal pemerintah mulai memilih pelaksana teknis yang nantinya akan menjalankan PKA tersebut, pemilihan dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa. Setelah adanya sosialisasi dan pembentukan pengurus pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana untuk menunjang dari PKA Desa Ringinrejo. Dalam kegiatan PKA terdiri dari kegiatan budidaya dan pengolahan produk pasca panen dan juga pemerintah mengadakan pelatihan dan sekolah lapang sebulan satu kali.

Pendampingan dilakukan oleh pelaksana teknis untuk memantau jalannya PKA di Desa Ringinrejo. Pendampingan bertujuan untuk memantau jalannya PKA sehingga dari pemantauan tersebut nanti akan dibuat sebagai laporan evaluasi yang nantinya akan dibahas dengan pemerintah Kabupaten melalui rapat koordinasi sebulan sekali dimana rapat tersebut juga membahas mengenai progres dari PKA di Desa Ringinrejo kedepan.

b.Fragmentasi

Dalam pelaksanaan PKA pemerintah pusat tidak intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Kerjasama yang dijalin lebih kepada hubungan antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Pemerintah Provinsi, setiap sebulan sekali rapat rutin dilakukan dalam rapat tersebut lebih banyak membahas mengenai progres dari PKA Ringinrejo. Sedangkan hubungan dengan pusat tidak terlalu intensif hal tersebut tidak terlepas dari adanya isu bahwa akan ada perubahan kebijakan dimana kebijakan PKA sudah tidak lagi menjadi prioritas dari Kementerian Pertanian.

Sedangkan koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pelaksana teknis juga baik, hal tersebut diakui oleh pelaksana dari kelompok sadar wisata bahwa sesekali pemerintah provinsi menanyakan terkait apa saja yang menjadi kebutuhan. Sejauh ini pemerintah Provinsi dan Kabupaten hingga pelaksana teknis sudah menyeragamkan komitmen untuk membawa PKA sesuai dengan tujuan awal dibentuknya PKA. Sehingga PKA mampu berjalan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Komunikasi yang dilakukan antara pelaksana dengan pelaksana maupun pelaksana dengan kelompok sasaran berjalan dengan baik sehingga menghasilkan koordinasi yang baik pula. Sumber daya PKA yang ada dalam pengimplementasian PKA di Desa Ringinrejo yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan, sumber daya informasi dan sumber daya kewenangan. Untuk sumber daya informasi dan kewenangan sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat masalah terhadap sumber daya manusia dan peralatan.

Dari hasil penelitian di lapangan petani masih belum bisa dalam melakukan diversifikasi rasa, selanjutnya kurang adanya kemampuan petani dalam melakukan inovasi dan pemasaran produk pasca panen akhirnya mengakibatkan produksi olahan tidak berkembang.

Selain itu ketersediaan buah terbatas, hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang masih jauh dari harapan sehingga mempengaruhi kegiatan budidaya buah belimbing. . Peralatan yang diberikan memang memiliki manfaat yang sangat penting namun jumlah dari beberapa peralatan masih ada yang kurang dari jumlah apa yang dibutuhkan, lalu ada beberapa peralatan yang justru mangkrak dan tidak terpakai dengan baik.

Disposisi yang berkaitan dengan pengangkatan birokrat sudah dilakukan dengan seleksi yang adil, meskipun dalam perekrutan tidak menggunakan persyaratan khusus. Namun bukan berarti pemerintah tidak memilih sumber daya pelaksana yang kompatibel, untuk menunjang kemampuan pelaksana pemerintah mengadakan pelatihan pada beberapa kesempatan. Mengenai insentif yang diberikan memang tidak sesuai terhadap tanggungjawab yang diberikan namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi para pelaksana.

Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan SOP atau tugas-tugas pelaksana yang harus dilaksanakan dan pembagian tugas yang disebut dengan fragmentasi. SOP yang dilakukan oleh pelaksana dari Tim POKJA Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata maupun SKPD lainnya yang juga terlibat sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan. Hanya saja terdapat beberapa kendala kurang adanya koordinasi yang baik antar pelaksana pusat dengan pelaksana yang ada dibawahnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan PKA di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Terkait diversifikasi rasa sendiri sebenarnya ada cara untuk mengubah rasa dari masam menjadi manis namun petani tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih baik dari sekarang, cara untuk meningkatkan rasa manis

tersebut didapat dari pupuk maka dari itu sebagai aktor yang bertanggungjawab sebagai pemberi fasilitas maka pemerintah perlu memberikan bantuan melalui subsidi pupuk agar petani juga tidak terlalu berat di pembiayaan. Adanya pupuk ini juga dapat disinergikan dengan menjadi koperasi sehingga selain petani dapat melakukan diversifikasi rasa mereka juga bisa menghidupkan kelembagaan yang sudah lama berhenti akibat perputaran uang yang tidak transparan dan tidak jelas keberadaannya.

Selain itu perlu diadakan kembali pelatihan untuk pengolahan produk tentang bagaimana membuat produk olahan yang memiliki kualitas tinggi sehingga laku dipasaran. Selain itu juga perlu diadakannya pelatihan untuk pemanfaatan teknologi karena pemasaran produk olahan sangat membutuhkan teknologi seperti internet, *web* dan lain-lain.

Pemerintah juga harus melengkapi sarana dan prasarana karena apabila kegiatan baik budidaya, produksi maupun kegiatan agrowisata tidak ditunjang dengan sarana yang lengkap maka kegiatan juga akan terhambat. Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan terkait insentif untuk para pelaksana terutama pelaksana teknis, meskipun mereka tidak memperlmasalahkan namun dengan adanya insentif yang sesuai dengan tanggungjawab yang mereka laksanakan mereka akan jauh lebih termotivasi dan memiliki komitmen untuk menjalankan segala kegiatan mengenai PKA.

Insentif juga merupakan wujud dari penghargaan para pelaksana yang mereka sangat memiliki pengaruh besar dalam jalannya PKA tanpa adanya mereka kebijakan PKA ini tidak akan terlaksana. Kebijakan PKA ini memang dirasa sangat penting untuk terus dilaksanakan karena melalui kebijakan PKA ini perekonomian masyarakat meningkat terlebih sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah menjadi petani.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2014. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur*. Surabaya : Bappeda Jatim

Herawan, Ade. 2013. *Implementasi Agropolitan Berbasis Sumber Daya lokal untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Studi provinsi Gorontalo)*. Jurnal Online

<http://ekbis.sindonews.com/read/997551/33/5-sektor-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi-ri-1430809457>
diakses pada tanggal 25 Desember 2015

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Winarno, Budi 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.